

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

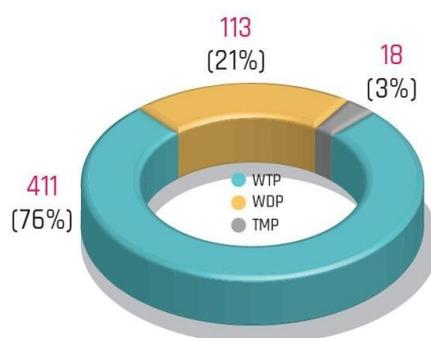
Peningkatan kinerja perlu dilakukan oleh organisasi swasta maupun organisasi sektor publik. Kinerja sektor publik dengan swasta berbeda, untuk organisasi swasta kebanyakan pengukuran kinerja berdasarkan tingkat laba, dalam sektor publik tidak dapat mengukur dengan tingkat laba dalam menilai keberhasilan atas organisasi tersebut dikarenakan tujuan utamanya bukan mencari laba tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil atas kegiatan yang dilakukan tentang penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap publik dan tercapainya strategi organisasi yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kinerja pemerintah daerah selalu menjadi perhatian publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu pencapaian atas visi, misi serta tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan yang tertera dalam dokumen perencanaan daerah, yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang metara dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah perlu melakukan peningkatan kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari segi keuangan, kinerja keuangan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut (mardiasmo, 2009) kinerja sektor publik dapat diukur dengan *value for money* yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.

Ikhtisar Hasil Pemeriksa Semester (IHPS) 1 Tahun 2018 & 2 Tahun 2018 dilakukan pemeriksaan keuangan dalam rangka untuk memberikan opini atas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja

bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas. Pemeriksaan PDDT untuk memberikan kesimpulan atas sesuatu yang diperiksa.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 2018 memeriksa 542 (100%) laporan keuangan pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) menyatakan 411 opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) , 113 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 18 opini Tidak Menyatakan Pendapat(TMP), Seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 Opini LKPD IHPS 1 2018

Sumber: <https://www.bpk.go.id/ihps>

Bedasarkan hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2018 dan semester kedua tahun 2018 oleh BPK , adapun beberapa hal yang diungkapkan yaitu:

1. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja pada IHPS semester pertama tahun 2018 sebanyak 12 objek, dan pada IHPS semester kedua tahun 2018 sebanyak 4 objek.
2. Laporan hasil pemeriksaan DTT pada IHPS semester pertama tahun 2018 sebanyak 36 objek, dan pada IHPS semester kedua tahun 2018 sebanyak 37 objek.
3. Pada IHPS semester pertama tahun 2018 terdapat 9.808 temuan dengan 15.773 permasalahan, sedangkan pada IHPS semsester kedua tahun 2018 adanya 4.376 temuan dengan 6.076 permasalahan. Permasalahan yang dimaksud terdiri dari kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan.

Permasalahan terkait dengan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah terdapat 2.089 permasalahan ketidakefektifan pada berbagai pemerintah daerah kabupaten/kota dengan nilai Rp 2.270 Miliar. Berdasarkan penjelasan diatas, laporan hasil kinerja BPK memuat kesimpulan bahwa kinerja secara umum belum sepenuhnya efektif. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek 3E (ekonomi, efisien, efektifitas). (IHPS BPK, 2 2018).

Pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah memuat enam tema pemeriksaan diantara lain: perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pembangunan kewilayahan, tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pada Kabupaten/Kota dipulau Sulawesi BPK melakukan pemeriksaan berikut pemeriksaan kinerja pada Kabupaten/Kota dari 6 Provinsi:

Tabel 1 Pemeriksaan Kinerja

Enittas	Jumlah Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
Provinsi Sulawesi Utara		
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	Kurang Efektif
Kabupaten Minahasa	1	Belum efektif
Kabupaten Minahasa Utara	1	Belum efektif
Kota Manado	1	Kurang Efektif
Provinsi Sulawesi Tengah		
Kabupaten Poso	1	Kurang Efektif
Provinsi Sulawesi Selatan		
Kabupaten Barru	1	Kurang Efektif
Kabupaten Kepulauan Selayar	1	Kurang Efektif
Kabupaten Maros	1	Belum Efektif
Kabupaten Soppeng	1	Belum Efektif
Provinsi Sulawesi Tenggara		
Kabupaten Wakatobi	1	Kurang Efektif
Provinsi Sulawesi Barat		
Kabupaten Mamasa	1	Kurang Efektif

Provinsi Gorontalo		
Kabupaten Gorontalo	1	Kurang Efektif
Kota Gorontalo	1	Belum Efektif
Jumlah	13	

Sumber: IHPS semester kedua 2018

Berdasarkan tabel 1.1 pemeriksaan untuk beberapa Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi BPK menyatakan masih belum efektif atau kurang efektif dalam pemeriksaan kinerja.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. (2019) dalam penelitian menjelaskan bahwa dana perimbangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana semakin tinggi dana perimbangan maka semakin besar dana yang diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya layanan publik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah et al. (2019) menjelaskan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang dimaksud yaitu dana yang di alokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah sumber utama dari APBN, dana perimbangan ini berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan alokasi khusus. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah et al. (2019), Aminah et al. (2019), Andirfa et al. (2016), Dewata et al. (2017) dengan hasil dana perimbangan (*Intergovernmental Revenue*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Natoen et al. (2019) dan Aswar (2019) mendapatkan hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain itu kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Apridiyanti (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dimana semakin tinggi tingkat pendapatan asli

daerah maka akan menunjukkan kemandirian dari daerah tersebut dan terhindar dari ketergantungan dana yang diberikan oleh pusat sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang diperoleh sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat maka dari itu akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Artinya pemerintah daerah dapat mampu menurunkan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, dan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjito et al. (2020) Otonomi daerah berharap setiap pemerintah daerah memiliki kemandirian yang besar dalam keuangan daerah, maka dari itu peranan pendapatan asli daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Penelitian sebelumnya yang sudah diteliti oleh Aswar (2019), Awwaliyah et al. (2019), Harjito et al. (2020) yang memperoleh hasil pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Apridiyanti (2019) menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah (*size*) juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. untuk menilai suatu ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari aset atau dari jumlah penduduk. Kiswanto & Fatmawati (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah dilihat dari total aset, dimana aset total aset yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, hasil dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Mulyani & Wibowo (2017) ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk, diharapkan semakin besar jumlah penduduk akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah merupakan saran dari penelitian (Aswar, 2019). Peneliti sebelumnya yang telah dilakukan oleh Natoen et al. (2019) dan Kiswanto&Fatmawati (2019) bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Dewata et al. (2017) dan Junaidi et al. (2019) bahwa ukuran

pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja Modal (*Capital Expenditure*) salah satu yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. penelitian yang telah dilakukan oleh Andirfa et al. (2016) menyatakan bahwa semakin meningkatnya alokasi belanja modal maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut karena belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan merasakan *impact* secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Belanja modal dilakukan pemerintah seperti pemabangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya (Ermawati & Aswar, 2020). Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Andirfa et al. (2016), Leki (2018) bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan peerintah daerah, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani & Respati (2019) belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena, saran penelitian, serta kesenjangan penelitian tersebut maka peneliti memandang perlu dilakukan penelitian dengan judul “pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakanng yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk membuktikan adanya pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk membuktikan adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dari penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dimana terdapat perbedaan indikator dari pneliti sebelumnya Aminah et al. (2019) penelitian ini mengukur ukuran pemerintah daerah (*size*) dengan menggunakan total pendapatan daerah dan pusat dibandingkan dengan jumlah penduduk. Teori dasar yang relevan dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori keagenan dan teori signaling. Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan penelitian sebelumnya dengan menambah variabel ukuran pemerintah daerah atas saran dari penelitian (Aswar, 2019). Diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh khususnya mengenai pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah (*size*), belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat Umum

Dapat memberikan masukan dalam melaksanakan kebijakan terkait

dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat memberikan informasi terkait dengan variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja keuangan sehingga tujuan dari organisasi akan tercapai dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Penelitian ini juga diharapkan menjadikan pemerintah daerah meningkatkan kemandiriannya tidak tergantung lagi dana dari pemerintah pusat sehingga dapat melakukan kegiatan operasional dari dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah tersebut.

c. Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah pusat mengenai tingkat efisiensi pemerintah daerah dan juga dapat digunakan sebagai alat pengawasan serta penilaian evaluasi terkait kinerja keuangan pemerintah daerah.